

**ARTIKEL**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN  
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP  
BELANJA DAERAH (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi  
Jawa Timur Periode Tahun 2016-2018)**



**Oleh:**

**NAMA: Sayekti**

**NPM: 13.1.02.01.0095**

**Dibimbing oleh:**

- 1. Erna Puspita, SE., M.Ak.**
- 2. Sigit Wisnu Setya Birawa, S.E., M.M.**

**PROGRAM STUDI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2020**



## SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SAYEKTI  
NPM : 13.1.02.01.0095  
Telepon/HP : 085606700092  
Alamat Email :  
Judul Artikel : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2018)  
Fakultas - Program Studi : EKONOMI-AKUNTANSI  
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
Alamat Perguruan Tinggi : JL.K.H. AHMAD DAHLAN No.76

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- Artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 17 Februari 2020
Pembimbing 1  Erna Puspita, SE, M.Ak. NIDN. 0711128803	Pembimbing 2  Sigit Wisnu S. B., S.E., M.M. NIDN.07201082202	Penulis,  Sayekti 13.1.02.01.0095

***PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN  
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA  
DAERAH (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur  
Periode Tahun 2016-2018)***

Sayekti

13.1.02.01.0095

Ekonomi - Akuntansi

(Email)

Sigit Wisnu Setya Birawa, S.E., M.M. dan Erna Puspita, SE., M.Ak.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

**ABSTRAK**

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan secara baik dan efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah karena salah satu indikator kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah Kota/Kabupaten.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka, sedangkan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ . (2) Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ . (3) SiLPA secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ . (4) Dari analisis dengan menggunakan uji F, menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Daerah (X2), dan SiLPA (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai  $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$  yang mana  $H_0$  ditolak, dan  $H_a$  diterima.

**KATA KUNCI:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Daerah.

## I. LATAR BELAKANG

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas

dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah.

Adapun struktur belanja berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Zebua (2014) dan Pangerapan menyatakan bahwa, belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi (2010) menjelaskan pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah

pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan secara baik dan efektif.

Kemudian, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode laporan.

Halim dan Kusufi (2012:229) menyebutkan bahwa, kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Daerah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 pasal 1 ayat 6 tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana berupa anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk program pembangunan berbagai fasilitas publik.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Pasal 1 ayat 31 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan



dengan Peraturan Daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2012:35) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya beban sesungguhnya dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. (3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. (4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah karena salah satu indikator

kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Abdullah, Syukriy, Rona, dan Riza (2015) menyatakan bahwa salah satu fenomena yang biasa dalam penganggaran di pemerintahan adalah perubahan dan revisi terhadap anggaran yang sedang dilakukan pada tahun berjalan. Abdullah, Syukriy, Rona, dan Riza (2015), menyatakan perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan antara target dan alokasi dengan perkembangan terkini di lapangan, misalnya karena terjadi perubahan asumsi yang mempengaruhi estimasi penerimaan dan pengeluaran, sehingga dengan adanya penyesuaian makatarget yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda, baik untuk perubahan anggaran penerimaan maupun perubahan anggaran pengeluaran (Abdullah, Syukriy, Narzy, dan

Ramadhani-atun, 2014). Dalam struktur APBD di Indonesia, komponen anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana ketiga-ketiganya dapat mengalami penyesuaian selama tahun berjalan. Logika penyusunan anggaran di Indonesia menggunakan tax-spending hypothesis, yang mengasumsikan bahwa besaran target penerimaan yang terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, akan menentukan perkiraan pengeluaran yang meliputi dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Hal tersebut memberi pengertian bahwa perubahan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan akan menyebabkan perubahan dalam anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan (Abdullah, Syukriy, Rona, dan Riza, 2015).

Beberapa studi terdahulu menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Nanda (2017) menemukan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Ketika PAD dan DAU pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur meningkat, maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga harus meningkatkan belanja langsungnya, yang di dalamnya

terdapat belanja pegawai seperti honorarium PNS, honorarium non PNS, serta uang lembur. Hasil penelitian Ferdiansyah, Dwi, dan Salmah (2018), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Lebih spesifik lagi, Abdullah, Syukriy, Rona, dan Riza (2015), menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Halim (2004:69) menyatakan bahwa, Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut Darise (2008:38) menyebutkan bahwa “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Berdasarkan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penelitian ini didukung oleh Rahma Wati, Masayu dan Martian Fajar, Catur (2017) menyatakan bahwa Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung, dan menurut hasil analisis Arni Asari, Ni Made dan Ketut (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan berpengaruh positif pada belanja daerah. pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi

pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Dalam LRA juga terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target pemerintah daerah dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang



bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat (Afkarina, 2017). SILPA sebagai penerimaan pembiayaan, dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran dalam APBD. SILPA diketahui secara pasti setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya disahkan. Kondisi ini menjadi alasan bagi legislatif dan eksekutif untuk mengalokasikan kembali (rebudgeting) dana tersebut melalui mekanisme perubahan APBD serta memberi ruang bagi penyusun anggaran untuk melakukan kebijakan dalam mengalokasikan SILPA tersebut (Sularso Restianto, dan Istiqomah, 2014).

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisa judul Pengaruh Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2018).

## II. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena

penelitian ini disajikan dengan angka-angka.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif. Untuk memperoleh data yang dikehendaki guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya, maka perlu melaksanakan penelitian ilmiah dan menggunakan jenis penelitian yang tepat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) yaitu Belanja Daerah (Y) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel independen) yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dengan mengakses website <https://jatim.bps.go.id/>.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pebiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018 diakses dari situ Homepage Indonesian Stock Exchange yaitu <https://jatim.bps.go.id/>.

## 2. Studi Kepustakaan

Segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti dan informasi dapat diperoleh dari laporan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan terdahulu dan buku-buku dan literatur-literatur.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat beberapa jenis analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian. Berikut adalah jenis analisis dan norma keputusan penelitian akan dijelaskan yaitu:

### 1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi seharusnya terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Dalam

melakukan uji asumsi klasik ada beberapa uji yang harus dilakukan yaitu:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual terdistribusikan secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik dan analisis statistik.

#### 1) Analisis Grafik

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal *probability plot* adalah sebagai berikut:

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2) Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:  
 $H_0$  = Data residual terdistribusi normal

$H_a$  = Data residual tidak terdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

a) Apabila probabilitas uji  $K-S < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti data terdistribusi tidak normal.

b) Apabila probabilitas uji  $K-S > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti data terdistribusi normal

## 3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model ini adalah sebagai berikut:

a) Dilihat dari nilai VIF, apabila nilai  $VIF > 10$  berarti terdapat multikolinearitas.

b) Dilihat dari nilai *Tolerance*, apabila nilai

$Tolerance < 0,10$  berarti terdapat multikolinearitas.

4) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan Uji *Durbin-Watson* (DW Test). Hipotesis yang akan diuji adalah:

H<sub>0</sub>: tidak ada autokorelasi ( $r=0$ )

H<sub>a</sub>: ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

b. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan melihat pola gambar *Scatterplots*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan grafik *Scatterplots* yaitu:

1) Jika terdapat pola tertentu pada grafik *Scatterplots*, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas;

2) Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pada regresi linier berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Belanja Daerah sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan IBM SPSS v.26 *for Windows*. Rumus dari regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + E$$

Dimana:

$Y$  = Belanja Daerah

$a$  = Koefisien Konstanta

$b$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Perimbangan

$X_3$  = SiLPA.

$E$  = Koefisien Error

d. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai *R square* yang kecil menandakan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai *Adjusted R2* lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R2* yang besar menandakan semakin besar pula kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

2. Uji Hipotesis

a. Pengujian secara Parsial (Uji  $t$ )

Uji  $t$  dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis

$H_0$ :  $b_1=0$ ; Variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah perusahaan. Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a$ :  $b_1 \neq 0$ ; Variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen.

2) Menentukan Taraf Kesalahan

Taraf Kesalahan yang umumnya digunakan peneliti terdahulu adalah 5% atau 0,05 artinya peneliti mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

3) Menentukan Kesimpulan

a)  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima apabila nilai signifikan  $\leq$  tingkat signifikan 0,05 berarti variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (Belanja Daerah).

b)  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak apabila nilai signifikan  $\geq$  tingkat

signifikan 0,05 berarti variabel bebas

(Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Belanja Daerah).

b. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis

$H_0: b_1=0$ ; Variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

$H_a: b_1 \neq 0$ ; Variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

2) Menentukan Kesimpulan

a)  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima apabila nilai signifikan  $\leq$



tingkat signifikan 0,05 berarti variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Belanja Daerah).

b)  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak apabila nilai signifikan  $\geq$  tingkat signifikan 0,05 berarti variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Belanja Daerah).

### III. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat

signifikansi (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ .

2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ .
3. SiLPA secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ .
4. Dari analisis dengan menggunakan uji F, menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Daerah (X2), dan SiLPA (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. =  $0,000 < 0,05$  yang mana  $H_0$  ditolak, dan  $H_a$  diterima.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy, Narzy, dan Ramadhaniatun. 2014. "Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dan Perspektif Keagenan." Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis.

Abdullah, Syukriy, Rona, dan Riza. 2015. "Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan

- Terhadap Belanja Modal.”  
Jurnal Iqtishadia Vol. 7 No.1:  
179-202.
- Afkarina. 2017. “Pengaruh PAD, DAU,  
SILPA dan Luas Wilayah  
terhadap Belanja Modal.” Jurnal  
Ilmu dan Riset Akuntansi 6(8):  
5.
- Arni Asari, Ni Made dan Alit  
Suardana, Ni Made. 2018.  
“Pengaruh Pendapatan Asli  
Daerah, Dana Perimbangan, dan  
Lain-Lain Pendapatan Daerah  
yang Sah pada Belanja Daerah.”  
E-Jurnal Akuntansi Universitas  
Udayana Vol. 25: Hal: 877-904.  
doi:10.24843.
- Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan  
Daerah : Akuntansi Sektor  
Publik. Jakarta: PT Indeks.
- Ferdiansyah, Irfan Risma Deviyanti,  
Dwi dan Pattisahusiwa, Salmah.  
2018. “Pengaruh Pendapatan  
Asli Daerah, Dana Alokasi  
Umum, Dana Alokasi Khusus,  
dan Dana Perimbangan  
Terhadap Belanja Daerah.”  
Jurnal Inovasi Vol. 14 No. 1:  
44-52.
- . 2013. Aplikasi Analisis  
Multivariate dengan Program  
IBM SPSS 19. Semarang:  
Badan Penerbit Universitas  
Diponegoro.
- Halim, A., dan M. S. Kusufi. 2012.  
Akuntansi Keuangan Daerah,  
Edisi Empat. Jakarta: Salemba  
Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Seri Akuntansi  
Sektor Publik-Akuntansi  
Keuangan Daerah. Jakarta:  
Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan  
Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Nanda Eka Octaviani. 2017. “Pengaruh  
Pendapatan Asli Daerah dan  
Dana Alokasi Umum Terhadap  
Belanja Langsung.” Jurnal Ilmu  
dan Riset Akuntansi Volume 6,  
Nomor 2.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
203/PMK.05/2013. 2013.  
tentang Pengelolaan Saldo  
Anggaran Lebih yang mengatur  
perhitungan SAL, penyimpanan  
dana SAL, penggunaan SAL,  
akuntansi dan pelaporan SAL  
dan penyelesaian selisih angka  
SAL.
- Rahma Wati, Masayu dan Martian  
Fajar, Catur. 2017. “Pengaruh  
Pendapatan Asli daerah dan  
Dana Perimbangan terhadap  
Belanja Daerah Kota Bandung.”  
Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1:  
Hal: 63-76.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan  
Pemerintah No. 71 Tahun 2010  
tentang Standar Akuntansi  
Pemerintahan.
- . 2006. Permendagri No. 13 Tahun  
2006 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . 2007. Permendagri No. 59 Tahun  
2007 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah.
- . 2014. Undang-Undang No. 23  
Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah.
- Zebua, Willman Fogati. 2014.  
“Pengaruh Alokasi Belanja  
Modal, Belanja Barang dan



Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan

Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013).”  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa No. 1  
Vol 3.